



Atika Nirmala¹
 Priti Ike Jelita²
 Asmuri³

PENDIDIKAN ISLAM DI ERA ORDE LAMA: KEBIJAKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT

Abstrak

Artikel ini membahas kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Lama di Indonesia, serta dampaknya terhadap masyarakat. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pendidikan Islam mengalami berbagai perubahan signifikan, baik dalam hal kebijakan maupun implementasinya di lapangan. Kebijakan tersebut berfokus pada upaya untuk mengintegrasikan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional, yang didorong oleh semangat nasionalisme dan kebutuhan untuk membentuk karakter bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai agama. Meskipun demikian, kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Lama juga menghadapi tantangan, seperti ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan perbedaan antara pendidikan agama tradisional dan pendidikan umum. Dampak dari kebijakan ini terlihat dalam perkembangan lembaga pendidikan Islam, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan agama, serta pembentukan identitas nasional yang lebih kuat. Artikel ini juga menganalisis bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi struktur sosial dan hubungan antara umat Islam dengan negara, serta bagaimana warisan kebijakan tersebut masih memengaruhi pendidikan Islam di Indonesia hingga saat ini.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Orde Lama, Kebijakan Pendidikan, Dampak Sosial, Indonesia

Abstract

This article discusses Islamic education policies during the Old Order in Indonesia, and their impact on society. During the reign of President Soekarno, Islamic education experienced various significant changes, both in terms of policy and implementation in the field. This policy focuses on efforts to integrate religious education into the national education system, which is driven by the spirit of nationalism and the need to shape national character based on religious values. However, Islamic education policies during the Old Order also faced challenges, such as inequality in the distribution of resources and differences between traditional religious education and general education. The impact of this policy can be seen in the development of Islamic educational institutions, increasing public awareness of the importance of religious education, as well as the formation of a stronger national identity. This article also analyzes how this policy influenced the social structure and relationship between Muslims and the state, as well as how the legacy of this policy still influences Islamic education in Indonesia today.

Keywords: Islamic education, Old Order, education policy, social impact, Indonesia

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembentukan karakter dan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang ideal mempertimbangkan beberapa faktor, seperti sosial, spiritual, dan intelektual. (Jamila Syam, 2016) Pendidikan Islam adalah proses belajar tentang ajaran dan praktik agama Islam secara keseluruhan. M Yusuf al-Qardawhi mengatakan bahwa Pendidikan Islam adalah pendidikan manusiawi seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. (Widya Ayu, 2022) Pendidikan Islam sangat penting dalam setiap aspek kehidupan umatnya karena agama Islam menekankan nilai-nilai moral dan spiritual yang sangat baik. Pendidikan Islam menghimbau masyarakat untuk menginternalisasikan prinsip-prinsip moral dan etika yang ditawarkan oleh Islam di samping memberikan pengetahuan tentang ajaran agama. Di Indonesia, pendidikan Islam memiliki peran

^{1,2}Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
 email: 22390124727@students.uin-suska.ac.id, 22390124794@students.uin-suska.ac.id,
 asmuri@uin-suska.ac.id

penting dalam sejarah pendidikan nasional, terutama pada masa Orde Lama (1945-1966). Masa ini ditandai dengan dinamika politik dan sosial yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Pemerintah saat itu berusaha mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem pendidikan nasional untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak dan berilmu. Kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Lama mencerminkan upaya pemerintah untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Namun, dalam praktiknya berbagai kebijakan yang diambil sering kali menghadapi tantangan, seperti konflik antara pendidikan agama dan pendidikan umum, serta perbedaan pandangan di antara berbagai kelompok masyarakat. Misalnya, madrasah dan pesantren sebagai institusi pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda, tetapi sering kali tidak mendapatkan perhatian yang setara dengan sekolah umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam yang diterapkan selama masa Orde Lama, serta dampaknya terhadap masyarakat. Dengan memahami kebijakan dan kondisi yang ada, diharapkan dapat ditemukan pelajaran berharga untuk pengembangan kebijakan pendidikan di masa depan. Melalui pendekatan ini, makalah ini berupaya memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kontribusi pendidikan Islam dalam membangun bangsa Indonesia pada masa tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library research). Metode kepustakaan (Library research) merupakan jenis penelitian yang data utamanya bersumber dari buku, jurnal, atau artikel yang berhubungan Pendidikan Islam di Era Orde Lama, Kebijakan dan Dampaknya terhadap Masyarakat. Dengan demikian akan memberikan gagasan baru yang relevan dengan topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia pada masa orde lama

Era Orde Lama adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan suatu bangsa Indonesia dipimpin oleh presiden pertama setelah berhasil mendapatkan kemerdekaan dan terbebas dari penjajah. Yaitu pada masa pemerintahan presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno yang menjabat sebagai kepala negara Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1965, atau tepatnya 11 Maret 1965. (Nata, Abuddin, 2004) Semangat yang senantiasa ada pada era ini selalu berdasarkan kepada Pembukaan UUD 1945 yang mengusulkan penghapusan segala bentuk diskriminasi, kolonialisme dan tindakan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, tokoh-tokoh nasional saat ini sedang diupayakan membentuk dan mewujudkan ketertiban nasional yang baik sesuai dengan keinginan masyarakat Indonesia. Di era orde lama, berbagai ideologi masuk dan di perkenalkan kepada Bangsa Indonesia guna dapat di pilih ideologi mana yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Seperti ideologi Sosialisme, Komunisme, Nasionalisme, Marhaenisme, Islamisme. Namun, ada tiga faham ideologi yang sangat mempengaruhi lika-liku perjalanan penetapan kebijakan pendidikan islam. tiga ideologi ini seringkali berbenturan dan saling singgung pada masa ini yaitu faham Nasionalis, Sekularis-Komunis, dan Islamis. (Fajar Almahmudi, 2023). Setelah melewati kondisi politik yang panas dan perdebatan sengit antara tiga faham ideologi, akhirnya ideologi Pancasila dipilih menjadi falsafah Negara Indonesia, karena ideologi ini yang paling sesuai dengan cita-cita dan harapan bangsa. Dalam kondisi rumit yang terjadi, Pemerintah Indonesia tetap berupaya memberikan perhatian terhadap perkembangan pendidikan islam. Pendidikan Islam telah mengiringi perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, tentu saja prakteknya telah di jalankan jauh dari sebelum masa penjajahan, sudah memasyarakat dan di selenggarakan oleh para tokoh elit muslim di Indonesia. Pada masa penjajahan, kolonial belanda sangat mencurigai keberadaan lembaga pendidikan islam karena di anggap sebagai pusat gerakan pemberontak terhadap kolonial. Karena kecurigaan para penjajah, maka lembaga pendidikan islam enggan untuk bekerja sama dan para tokoh elit muslim mendorong para santri dan siswa belajar lebih giat dan berjuang mengusir penjajah sehingga pendidikan islam mampu melahirkan kader pemimpin bangsa yang agamis, nasionalis dan memiliki jiwa merah putih. (Muzammil, As'ad, 2016) Pada tanggal 3 Januari 1946 pemerintah Indonesia membentuk Departemen Agama yang ditugaskan untuk menaungi Pendidikan Islam dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya (Mudzakkir, 2015) Kemudian Departemen Agama memberi masukan kepada Kementerian Pendidikan

Pengajaran dan Kebudayaan (Kementerian PK dan K) untuk merevisi pelajaran Budi Pekerti yang merupakan peninggalan Jepang dengan Pendidikan Islam.

Kebijakan ini dilaksanakan mulai Desember 1946. Terkait Pembinaan Lembaga Pendidikan, Departemen Agama berkolaborasi dan bekerja sama dengan Kementerian PK dan K. Pada tanggal 27 Desember 1945, Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) menyampaikan bahwa Madrasah dan Pesantren selalu ada dan ikut serta dalam mencerdaskan bangsa dan oleh karena itu BPKNP berpendapat sudah sangat layak dan pantas Pendidikan Islam mendapat perhatian lebih dari Negara. Dengan terjadinya kejadian ini terlihat jelas bahwa Kementerian menghimbau Pemerintah agar memberi perhatian lebih kepada pelaksanaan Pendidikan Islam dan juga kepada lembaga nya seperti Madrasah dan Pesantren. (Djaelani timur, 1980). Departemen agama dan Kementerian PK dan K juga meminta kepada Madrasah dan Pesantren yang masih tradisional untuk mentransformasi sistem pendidikannya menjadi lebih maju dengan cara menambahkan pelajaran-pelajaran umum dalam kurikulum namun tetap mempertahankan model pembelajaran klasikalnya. Selanjutnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia pada masa orde lama adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dikeluarkan pada Desember 1946 oleh Kementerian Agama dengan Kementerian PK dan K. SKB ini mewajibkan pelajaran agama Islam di sekolah umum. Sebaliknya, pendidikan umum diberikan di sekolah atau lembaga pendidikan Islam, baik Madrasah maupun Pesantren. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan Indonesia masa ini mengalami dualisme, di mana pelajaran agama digabungkan dengan pelajaran umum. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, bab XII, pasal 20, menetapkan bahwa sekolah negeri dan orang tua siswa harus terus mendorong anak-anak mereka untuk belajar agama. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa sekolah-sekolah harus melaksanakan pelajaran agama dan umum sebagaimana yang disepakati oleh Kementerian PK dan K. (Sudarmono, 2020) Dalam artian pendidikan islam pada masa orde lama menjadi titik awal mulai berkembang, namun masih cenderung terfragmentasi dan banyak pendidikan islam yang beroperasi mandiri. Kebijakan pemerintah selanjutnya adalah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan Pendidikan Islam yang terdapat pada Permen bersama Departemen Agama dan Kementerian PK dan K nomor 1432 tanggal 20 Januari 1951 yang berisi empat pasal. Empat pasal ini memuat tentang perintah mengadakan pendidikan Agama bagi sekolah dasar dan lanjutan, bagaimana mekanisme pembagian jam pelajaran Agama di setiap tingkatan kelas dan di setiap tingkatan jenjang sekolah serta bagaimana setiap peserta didik untuk tetap dapat belajar pendidikan Agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Dari sudut pandang kurikulum yang di gunakan oleh Pendidikan Islam di Indonesia diawali dengan Pemerintah memberi kepercayaan dan menugaskan KH Imam Zarkasyi dari Pondok Pesantren Ponorogo untuk membentuk kepanitiaan guna untuk membahas dan membentuk Kurikulum Pendidikan Islam. Hingga akhirnya resmi di sahkan hasilnya oleh Departemen Agama pada tahun 1952. Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, menurut ketatanegaraan sebelum MPR dibentuk menurut UUD 1945, terdapat MPRS yang didirikan pada tahun 1959. Selanjutnya, dalam sidang pleno MPRS pada bulan Desember 1960, diputuskan bahwa kegiatan mental, agama, dan kebudayaan harus dilakukan dengan cara spiritual dan material agar setiap warga negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaannya Indonesia serta menolak pengaruh budaya asing yang buruk. Ayat 3 dari pasal tersebut menyatakan bahwa di sekolah-sekolah umum dari sekolah rendah (dasar) hingga universitas, pendidikan agama menjadi bagian dari kurikulum. Namun, yang harus lebih diperhatikan bahwa siswa berhak untuk menolak pendidikan agama jika mereka menolaknya. Pada tahun 1965, muncul kesadaran baru bagi umat Islam muncul di akhir Orde Lama. Terdapat minat yang mendalam terhadap masalah pendidikan dalam upaya memperkuat Islam, yang memungkinkan banyak organisasi Islam didirikan. Pada masa ini Pemerintah berhasil menciptakan dan meresmikan lembaga Pendidikan Islam yang moderat seperti Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri serta tersebar hampir seluruh wilayah Indonesia lembaga pendidikan islam seperti Madrasah di tahun 1960. (Salsabila. Dkk, 2021) Puncaknya terjadi pada akhir pemerintahan orde lama, ketika Umat Islam mulai membangun lembaga pendidikan Islam. Mereka mendirikan beberapa lembaga pendidikan Islam yang lebih baik dan lebih maju seperti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) mencakup pendidikan tinggi, Madrasah Diniyah, Madrasah Swasta Modern, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, dan Pesantren Indonesia Klasik.

Faktor-faktor Penetapan Kebijakan Pendidikan Islam Orde Lama

Seiring perjalanan berkembangnya Pendidikan Islam Indonesia, terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi, yaitu :

Faktor Politik

Politik merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kebijakan yang ada di Indonesia termasuk Kebijakan Pendidikan Islam. Visi Presiden pertama Indonesia yaitu Ir. Soekarno dengan kekuatan ideologi Nasionalisme. Nasionalisme adalah sebuah paham atau ideologi yang mempertegas bahwa seluruh masyarakat di Indonesia adalah sama dalam keanggotaan dan kewarganegaraan. Mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara atas segala sesuatu lainnya. (Kusumawardani, 2004) Marhaenisme Soekarno adalah Ideologi yang menempatkan semua lapisan masyarakat dalam posisi yang sama dalam hal ekonomi, baik yang memiliki alat untuk produksi atau tidak. Paham ini mempertegas bahwa kemiskinan yang terjadi diakibatkan sumber kekayaan ekonomi masyarakat dirampas secara paksa, lalu masyarakat dipaksa untuk bekerja. Maka Marhaenisme datang untuk menolak keadaan tersebut. (Padma, 2020). Sementara itu paham sekularisme juga sangat di khawatirkan muncul dalam pemerintahan Indonesia pada saat itu. Sekularisme adalah kerangka etika yang menggambarkan agama atau keyakinan agama supranatural yang mendorong orang untuk terus meningkatkan standar hidup mereka dengan menggunakan kehendak bebas mereka untuk mencari kebaikan di dunia. Di sisi lain, kaum sekularis percaya bahwa atheisme pada dasarnya adalah preposisi sekularisme. (Nurhayati, 2020) Pemerintah yang mengusung paham Sekularisme, mengupayakan agar nilai-nilai Islam dan kebutuhan pendidikan yang lebih sekuler itu menjadi seimbang. Sementara aspirasi masyarakat muslim Indonesia menginginkan nilai-nilai Islam tetap ada di setiap kebijakan yang ditetapkan Pemerintah, bahkan Organisasi Masyumi menginginkan Indonesia menjadi "Negara Islam" di forum Konstituante 1959.

Tentu saja Masyarakat Muslim Indonesia menolak paham Sekular dari Pemerintah, karena di khawatirkan seiring berjalannya waktu dan kepercayaan paham Sekular akan mengikis pengaruh Agama Paham yang bertolak belakang antara paham sekularisme dan Islam cukup membuat keadaan Negara menjadi sangat sensitif.

Faktor Perubahan Sosial

Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan mengalami Perubahan sosial yang sangat signifikan. Tidak ada Pendidikan Islam yang dilaksanakan dengan cara pendidikan formal pada masa itu. Islam sudah ada dan telah menyatu dengan Masyarakat Muslim Indonesia jauh dari sebelum masa penjajahan. Menurut Romlah (2016) "Kebijakan pemerintah Orde Lama ini merupakan awal mula dari munculnya pendidikan Islam yang terjadi secara menyeluruh dari kelembagaan (madrasah) maupun non lembaga (masjid dan surau yang digunakan sebagai tempat untuk mengaji). Madrasah di Indonesia yang dikelola oleh suatu organisasi sosial kemasyarakatan banyak dipengaruhi oleh orientasi organisasinya. Selama masa penjajahan Pendidikan Islam hanya dilakukan masyarakat di rumah-rumah ulama dan surau yang berada di lingkungannya.

Faktor Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam

Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia tidak lepas dari peran Ormas Islam yang memperjuangkan kemajuan pendidikan Islam. Organisasi masyarakat atau disingkat ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia terhadap organisasi berbasis massa yang dibentuk dengan tujuan tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, pendidikan dan sosial. Dengan demikian, ormas Islam dapat diartikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai Al-Qur'an dan Sunnah serta memajukan umat Islam dalam berbagai bidang; baik dalam bidang agama, pendidikan, sosial maupun budaya. (Shomad, 2015) Adapun peran organisasi masyarakat (Ormas) Islam dalam kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Lama di Indonesia sangat signifikan.

Faktor Pengaruh global

Terhadap kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Lama di Indonesia dapat di tinjau dari beberapa aspek:

- a. Pemikiran Reformis, Ide-ide dari pemikir Islam modernis, seperti Muhammad Abduh dan Rashid Rida, memberikan inspirasi untuk memperbarui pendidikan Islam, mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- b. Pendidikan dari Timur Tengah. Hubungan dengan negara-negara Muslim di Timur Tengah membawa berbagai model pendidikan, yang mendorong pengembangan kurikulum dan metode pengajaran yang lebih inovatif.
- c. Interaksi dengan Barat. Pengaruh sistem pendidikan Barat juga terlihat dalam penerapan pendekatan-pendekatan baru dalam pengajaran, seperti penggunaan metode pendidikan progresif yang lebih interaktif.
- d. Globalisasi Ide. Proses globalisasi ide-ide pendidikan menjadikan masyarakat lebih terbuka terhadap konsep-konsep baru, memicu reformasi dalam pendidikan Islam yang lebih inklusif dan adaptif.
- e. Melalui Jalur Beasiswa dan Pertukaran Pelajar. Program beasiswa dan pertukaran pelajar dengan negara-negara lain meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan memperluas wawasan para pendidik dan pelajar di Indonesia.

Faktor Tantangan Internal Masa Orde Lama

Kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pada masa orde lama mencakup beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dan implementasi kebijakan tersebut :

- a. Perbedaan Pandangan
Ada berbagai aliran dan pemikiran dalam Islam yang seringkali memiliki pandangan berbeda mengenai pendekatan pendidikan, kurikulum, dan metode pengajaran.
- b. Kualitas Sumber Daya Manusia. Kualitas guru dan pendidik di lembaga pendidikan Islam seringkali bervariasi. Kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional dapat memengaruhi kualitas pengajaran.
- c. Keterbatasan Fasilitas
Pada Masa Orde Lama Fasilitas Pendidikan Islam di Indonesia masih sangat terbatas, banyak lembaga pendidikan Islam yang melaksanakan proses pembelajarannya dengan fasilitas seadanya terutama di daerah terpencil, mengalami kekurangan fasilitas dan sumber daya, yang menghambat proses belajar mengajar.
- d. Adaptasi terhadap Perubahan
Tantangan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi terkini dalam pendidikan masih menjadi kendala bagi banyak lembaga pendidikan Islam.
- e. Pergeseran Nilai Sosial
Perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, seperti semakin menguatnya individualisme, dapat memengaruhi partisipasi dan minat masyarakat dalam pendidikan Islam.
- f. Stigma dan Persepsi Negatif
Beberapa stigma negatif terhadap pendidikan Islam di beberapa kalangan, yang dapat mempengaruhi minat dan dukungan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Lama

Implementasi kebijakan pendidikan Islam di madrasah dan pesantren pada masa Orde Lama memiliki beberapa karakteristik dan peran penting dalam sistem pendidikan nasional:

- a. Kurikulum Terintegrasi, Madrasah dan pesantren mengadopsi kurikulum yang menggabungkan pelajaran agama dengan pendidikan umum, menyiapkan siswa dengan keterampilan praktis dan pengetahuan agama.
- b. Fokus pada Pendidikan Karakter, Institusi ini menekankan pengembangan karakter dan moral, dengan tujuan menciptakan generasi yang tidak hanya berilmu tetapi juga berakhlak baik.
- c. Peran dalam Pendidikan Formal, Madrasah mulai diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan formal, dengan adanya program yang lebih terstruktur dan akreditasi dari pemerintah.
- d. Pendidikan Berbasis Komunitas, Pesantren berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat, mendidik generasi muda dan menjadi tempat diskusi serta pengembangan pemikiran Islam.
- e. Kemandirian dan Pemberdayaan, banyak pesantren mengandalkan dana mandiri melalui infaq dan sumbangan, yang mendorong kemandirian dalam pengelolaan pendidikan.
- f. Pelatihan dan Pembentukan Guru, Madrasah dan pesantren berperan dalam melatih guru-guru yang kompeten, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia.
- g. Respon terhadap Perubahan Sosial, institusi ini beradaptasi dengan perubahan sosial dan tuntutan zaman, seperti memasukkan teknologi dalam pembelajaran.

Perbandingan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum Masa Orde Lama

Meskipun Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum memiliki tujuan pendidikan yang penting, pendekatan dan pengakuan pemerintah terhadap masing-masing jenis pendidikan menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam kebijakan selama masa Orde Lama. Hal ini dapat di tinjau dari beberapa kebijakan pemerintah yang mencakup beberapa aspek :

- a. Pengakuan Resmi, Pendidikan umum mendapatkan pengakuan yang lebih kuat dari pemerintah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, sementara pendidikan Islam, meskipun diakui, sering kali dianggap sebagai pendidikan alternatif.
- b. Kurikulum, Pendidikan umum mengikuti kurikulum nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan pendidikan Islam memiliki kurikulum yang lebih berfokus pada ajaran agama, meskipun ada usaha untuk mengintegrasikan pelajaran umum.
- c. Pendanaan, Pendidikan umum umumnya mendapatkan lebih banyak dukungan finansial dari pemerintah, sementara pendidikan Islam sering kali bergantung pada sumbangan masyarakat dan kemandirian lembaga.
- d. Kualitas dan Standar, Pendidikan umum diharapkan memenuhi standar tertentu yang ditetapkan pemerintah, sedangkan pendidikan Islam mengalami variasi kualitas tergantung pada sumber daya masing-masing lembaga.
- e. Fokus Pendidikan dan fasilitas infrastruktur. Pendidikan umum lebih terarah pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan praktis untuk dunia kerja, sementara pendidikan Islam menekankan pembentukan karakter dan pemahaman agama. Fasilitas infrastruktur yang jauh berbeda antara sekolah umum dan pendidikan Islam.
- f. Peran dalam Masyarakat, Pendidikan Islam berfungsi sebagai pusat komunitas dan penguatan nilai-nilai keagamaan, sedangkan pendidikan umum lebih berfokus pada pembentukan individu yang siap berkontribusi dalam masyarakat modern.

SIMPULAN

Pendidikan Islam pada masa Orde Lama masih banyak tantangan dan perbaikan dalam setiap Kebijakannya. Kebijakan tersebut mencerminkan usaha Pemerintah untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional. Pemerintah pada masa itu berupaya mengembangkan lembaga pendidikan Islam dan memberikan pengakuan resmi terhadap madrasah dan pesantren. Namun, tantangan seperti kurangnya alokasi anggaran, konflik ideologis, dan pengaruh politik sering menghambat implementasi kebijakan yang efektif. Meskipun ada kemajuan dalam akses pendidikan bagi masyarakat Muslim, kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara madrasah dan sekolah umum masih menjadi isu penting. Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Lama memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, meski perlu ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Faiz,dkk. “Studi Kritis Peran Ormas Islam Dalam Pengembangan Lembaga PendidikanIslam Pada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah,Dan Perti” *Journal Of International Multidisciplinary Research* Vol:1, Nomor:2, Desember 2023Halaman :515-52
- Cahyaningtyas, Padma, Djono, dan Tri Yuniyanto. “Ideologi Marhaenisme Masa PemerintahanSoekarno Tahun 1950-1965.” *Jurnal Candi* 20, no. 2 (2020):54–69.
- Djaelani, Timur. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Bangunan Perguruan Agama.
- Fajar Almahmudi,“Kebijakan Pendidikan Islam pada orde lama”, *Jurnal wawasan sarjana*,Vol.2 No.3(2023)Ilmiah Kreatif 18, no. 1 (2020): 17–26.Jakarta: Dermaga, 1980.
- Jamila Syam, “Pendidikan Berbasis Islam Yang Memandirikan Dan Mendewasakan,” *EduTech:Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2016): 73–83.
- Kusumawardani, Anggraeni, dan Buletin Psikologi. “Nasionalisme.” *Buletin Psikologi* XII, no.2 (2004): 61–72
- Mudzakkir.“Pendidikan Islam Masa Orde Lama Dan Orde Baru.” *Jurnal Al Fatih* (2015): 5566.
- Muzammil, As’ad. “Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Pendidikan Dari Orde Lama SampaiOrde Baru (Suatu Tinjauan Historis).” *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam* 2, no. 2(2016): 183.
- Nata, Abuddin. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Nuryanti, M., & Hakim, L. (2020).*Pemikiran Islam Modern Syed Muhammad Naquib Al Attas*. Substantia: *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 22(1).

- Romlah.(2016). Manajemen Pendidikan Islam. Manajemen Pendidikan Islam, 1232.<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>Sipayung,Sari,PutriIndahSari,andRizkaSuryaPutri,,AsiN^o,2(1854),725–36
- Salsabila, Sonia Sinta, dkk. Implikasi Pendidikan Islam di Indonesia pada Zaman Orde Lama,Baru, danReformasi.” Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam 8, no. 2 (2021): 8–15.
- Shomad,A. (2015). Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam HukumIndonesia.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarmono, Muh Aidil. “Tinjauan Sejarah Pendidikan Islam Masa Orde Lama.”
- Jurnal Walian, A., Rusli, R., & Mardiah, A. (2022). Kontribusi Pemikiran Islam dalam Peradaban Modern. Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dakwah, 02.
- Widya Ayu Ningsih,”Prinsip-prinsip pendidikan islam”, Jurnal At-Tabayyun,Vol.5 No.1(2022) :67-76
- Zenityas Gheafitri, and Ardiana Hanatan, „Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Peserta DidikDengan Penilaian Tes Dan Non Tes”, Jurnal Pembelajaran Fisika, 11.2 (2022).